



VOLUME 21 NO 1, JANUARI 2019

JURNAL EKONOMI & BISNIS DHARMA ANDALAS

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Dewi Sartika¹, Atika Ulfa², Andre Ilyas³

^{1,2}) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas

³) Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

¹dsartika959@yahoo.com

²atikaulfa0110@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Karena itu, dengan meningkatnya penerimaan dalam pembentukan PAD, akan menunjukkan peningkatan otonomi fiskal daerah, serta mengurangi ketergantungan dana pembangunan daerah dari pusat. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dari tahun 2012 sampai 2016. Kemudian diproyeksikan untuk tahun 2017-2020, berupa data pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan dari sisi capaian pajak termasuk pada kriteria efektif. Dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil. Sedangkan dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk pada kriteria cukup baik. Capaian retribusi juga termasuk pada kriteria efektif. Dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil, dan dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk pada kriteria kurang baik. Diharapkan untuk masa yang akan datang, penerimaan pajak dan retribusi kabupaten/kota di Sumatera Barat bisa ditingkatkan lagi dengan upaya pemungutan yang maksimal dan pengawasan yang ketat.

Kata Kunci: *Potensi; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; PAD*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dengan cara meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari bantuan pemerintah pusat dan dapat juga berasal dari pemerintah daerah sendiri. Tetapi, tidak semua sumber-sumber pembiayaan pemerintah pusat dapat diberikan kepada daerah. Pemerintah daerah

diwajibkan untuk dapat menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2001, daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan penggalian sumber dana yang berasal dari daerah sendiri di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2016 belum berjalan maksimal. Tingkat kemandirian dalam pembiayaan pembangunannya masih rendah. Hal ini dapat diukur dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sebagai modal dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tahun 2016 sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan (82,02 persen) yang tersedia di Tabel 1 Sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerahnya hanya sebesar 8,95 persen, sisanya rata-rata lain-lain pendapatan yang sah 9,03 persen. Hal ini mencerminkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat belum dapat secara maksimal menggali potensi daerah dalam membangun daerahnya, karena masih sangat bergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kotase-Sumatera Barat
Menurut Komponennya Tahun 2016

No	Uraian	Penerimaan Daerah (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pendapatan Daerah	8 812 774 431.53	100.00
1.	Pendapatan Asli Daerah	1 682 836 147.31	8.95
2.	Dana Perimbangan	5 430 518 599.49	82.02

No	Uraian	Penerimaan Daerah (000 Rp)	%
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 699 419 684.73	9.03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat, perlu dilakukan upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. PAD sangat penting dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Menurut Komponennya Tahun 2016

No	Uraian	Nilai (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pendapatan Asli Daerah	1 682 836 147.31	100.00
1.	Pajak Daerah	474 166 337.58	28.17
2.	Retribusi Daerah	170 397 862.00	10.13
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	150 033 521.28	8.92
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	888 238 426.45	52.78

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Sumber PAD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tahun 2016, yang berasal dari pajak daerah cukup besar (28,17 persen). Sumber yang berasal dari retribusi daerah sekitar 10,13

persen. Melihat kondisi ini, pajak daerah dan retribusi daerah berpotensi untuk ditingkatkan sebagai penyumbang peningkatan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3
Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Tahun 2012-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	806 467 783.91	249 912 520.70	164 051 614.59
2013	949 239 773.16	305 188 564.39	225 600 371.08
2014	1 351 203 427.71	389 572 611.47	323 517 142.15
2015	1 578 229 610.64	431 625 550.81	227 843 838.91
2016	1 682 836 147.31	474 166 337.58	170 397 862.00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

PAD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama periode 2012 sampai 2016 menunjukkan peningkatan. Kondisi ini didukung oleh peningkatan penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hanya saja penerimaan yang berasal dari retribusi daerah menunjukkan angka yang berfluktuasi (Tabel 3).

Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk mendorong perekonomian. Pembangunan sarana dan prasarana dapat menunjang perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya pembangunan tersebut

diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Pajak dan retribusi yang diperoleh digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Penelitian ini akan merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Susnawati, dkk pada tahun 2014 yang berjudul "Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro" dengan hasil penelitian bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian di lokasi yang berbeda yaitu pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan judul "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar capaian, pertumbuhan, dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui besar capaian, pertumbuhan, dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui nilai proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan dan peristiwa. Menurut Arikunto (2010) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2011). Data yang diperoleh secara tidak langsung berasal dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, seperti: Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, serta sumber-sumber lainnya.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan memfokuskan penelitian untuk membahas tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 sampai dengan 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai materi pembahasan, pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan menunjang dan membuktikan hasil dari isi penelitian nantinya. Dalam hal ini data-data yang diperlukan diambil dari BKD Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2012-2016).
- b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2012-2016).
- c. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2012-2016).

2. Studi kepustakaan

Adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya, seperti Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan berbagai edisi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan selanjutnya berupa rasio efektifitas, analisis tingkat pertumbuhan, analisis tingkat kontribusi, dan analisis proyeksi.

Rasio Efektifitas

Menurut Putri (2011) dalam Syafitri (2016) Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD maupun komponen-komponen PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. rumus untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas PD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas PD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Efektifitas PD : Efektifitas Pajak Daerah
- Efektifitas RD : Efektifitas Retribusi Daerah

Terdapat kriteria untuk menentukan apakah pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan efektif atau tidak, kriteria tersebut diantaranya adalah:

Tabel 4
Kriteria Efektifitas

Efektifitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mujiyati (2014)

Analisis Pertumbuhan

Menurut Halim (2014) dalam Syafitri (2016) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode

berikutnya, rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan adalah:

$$gXi = \frac{Xi_t - Xi_{(t-1)}}{Xi_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- gXi : Pertumbuhan pajak daerah/retribusi daerah
- Xi_t : Jumlah jenis pajak daerah/retribusi daerah tahun tertentu
- Xi_(t-1) : Jumlah jenis pajak daerah/retribusi daerah tahun sebelumnya
- t : tahun

Untuk menentukan apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan berhasil atau tidak, dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007)

Analisis Kontribusi

Menurut Halim (2001) dalam Syafitri (2016) kontribusi daerah adalah seberapa besar pengaruh atau peran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$Y = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PD/RD}}{\text{Realiasasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Y : Kontribusi Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- PD : Pajak Daerah
- RD : Retribusi Daerah

Terdapat kriteria untuk menentukan apakah kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD sudah baik atau belum, kriteria tersebut diantaranya adalah:

Tabel 6
Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
-----------------------	----------

Persentase Kontribusi	Kriteria
≥ 50%	Sangat Baik
40% – 50%	Baik
30% – 40%	Sedang
20% – 30%	Cukup Baik
10% – 20%	Kurang Baik
≤ 10%	Sangat Kurang Baik

Sumber: Halim (2004)

Analisis Proyeksi

Menurut Modul Pendapatan Daerah, (2013) dalam Susnawati, dkk (2014) secara umum, persamaan anuitas dapat ditulis sebagai berikut:

Jika nilai P awal adalah P_0 dan tingkat pertumbuhan = r, maka:

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

Untuk mendapatkan rata-rata pertumbuhannya (r) maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{(P_t)^{\frac{1}{t}}}{P_0} - 1$$

Keterangan:

- P_0 : Penerimaan Pajak tahun awal
- P_t : Penerimaan Pajak tahun t
- r : Tingkat Pertumbuhan
- t : waktu/tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah

Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah

Target penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selalu optimis, meningkat setiap tahun. Hanya saja realisasi pencapaiannya yang bervariasi, kadang tidak mencapai target (kurang dari 100 persen), kadang malah melebihi target yang sudah ditetapkan (lebih dari 100 persen).

Tabel 7
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Kabupaten :			
1 Kep. Mentawai	9 880 950 000.00	6 446 622 333.00	65,24
2 Pesisir Selatan	55 172 359 965.00	63 170 292 781.10	114,50
3 Solok	44 121 115 886.00	45 766 342 858.70	103,73
4 Sijunjung	34 119 776 615.00	38 382 883 937.39	112,49
5 Tanah Datar	50 721 628 361.00	47 570 653 967.93	93,79
6 Padang Pariaman	104 305 705 000.00	100 329 576 947.72	96,19
7 Agam	77 643 066 130.00	84 750 801 250.13	109,15
8 Limapuluh Kota	52 794 354 235.00	55 821 150 187.50	105,73
9 Pasaman	29 559 546 345.00	32 287 651 337.76	109,23
10 Solok Selatan	28 514 059 519.00	19 167 377 266.00	67,22
11 Dharmasraya	68 387 259 432.00	45 803 613 772.68	66,98
12 Pasaman Barat	67 667 681 177.00	63 624 198 421.09	94,02
Jumlah Kabupaten	622 887 502 665.00	603 121 165 061.00	96,83
Kota :			
13 Padang	990 645 315 319.00	978 293 463 613.45	98,75
14 Solok	24 267 116 566.00	26 180 245 538.22	107,88
15 Sawahlunto	19 189 682 163.00	19 154 326 214.04	99,82
16 Padang Panjang	24 024 579 506.00	24 654 365 364.00	102,62
17 Bukittinggi	136 894 763 156.00	129 435 093 001.00	94,55
18 Payakumbuh	43 298 306 888.00	45 222 190 735.00	104,44
19 Pariaman	22 232 662 313.70	24 404 735 415.00	109,77
Jumlah Kota	1 260 552 425 911.70	1 247 344 419 880.71	98,95
Jumlah Kabupaten/Kota	1 883 439 928 576.70	1 850 465 584 941.71	98,25

Sumber: Data diolah

Secara total, target penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2012-2016, sebesar Rp. 1.883,44 milyar. Sementara realisasinya mencapai Rp. 1.850,46 milyar (98,25 persen). Berarti, secara keseluruhan penerimaan pajak daerah pada periode tersebut tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Jika kita membandingkan penerimaan pajak kabupaten dengan kota, ternyata pencapaian pajak daerah kota lebih tinggi dibandingkan pencapaian pajak kabupaten pada periode yang sama. Target pajak kabupaten sebesar 622,89 milyar rupiah dengan realisasi sebesar Rp. 603,12 milyar. Artinya realisasi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hanya tercapai sekitar 96,83 persen. Sedangkan target pajak kota sebesar 1.260,55 milyar rupiah dengan realisasi sebesar Rp. 1.247,34 milyar. Artinya realisasi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hanya tercapai sekitar 98,95 persen.

Sebagai ibukota provinsi, kota Padang tercatat sebagai penerima pajak

terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, yakni sebesar Rp. 990,65 milyar. Diikuti oleh kota Bukittinggi (Rp.129,44 milyar), dan kabupaten Padang Pariaman (Rp. 100,33 milyar). Sementara Kepulauan Mentawai sebagai daerah pemekaran menerima perolehan pajak paling rendah (Rp. 6,45 milyar), diikuti kota Sawahlunto (Rp.19,15 milyar) dan Kabupaten Solok Selatan (Rp. 19,17 milyar). Capaian pajak paling tinggi adalah di Pesisir Selatan (114,50 persen) diikuti oleh Sijunjung (112,49 persen) dan Kota Pariaman (109,77 persen). Sedangkan capaian penerimaan pajak terendah terdapat di Kabupaten Mentawai (65,24 persen) diikuti oleh Dharmasraya (66,98 persen) dan Solok Selatan (67,22 persen).

Pertumbuhan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat selama tahun 2013-2016, serta rata-ratanya sebagai berikut:

Tabel 8
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)				
	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Kabupaten:					
1 Kep. Mentawai	-	55,14	57,04	32,08	48,09
2 Pesisir Selatan	76,73	25,56	-7,51	-4,91	22,47
3 Solok	11,17	48,83	5,18	5,47	17,66
4 Sijunjung	8,08	37,48	11,98	22,88	20,11
5 Tanah Datar	12,08	15,70	14,96	8,26	12,75
6 Pdg Pariaman	3,40	70,44	-1,46	16,85	22,31
7 Agam	20,90	16,27	11,17	11,91	15,06
8 Limapuluh Kota	- 14,18	40,35	3,78	16,16	11,53
9 Pasaman	7,24	18,67	22,24	14,00	15,54
10 Solok Selatan	42,72	23,17	7,37	12,40	21,41
11 Dharmasraya	7,80	52,18	2,14	8,45	17,64
12 Pasaman Barat	16,48	121,64	-32,82	2,48	26,94
Jumlah Kabupaten	15,72	44,20	- 0,14	10,47	17,56
Kota:					
13 Padang	28,67	17,62	19,65	10,25	19,05
14 Solok	- 3,42	42,50	17,40	7,40	15,97

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)				
	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
15 Sawahlunto	7,26	31,55	-2,13	14,79	12,86
16 Padang Panjang	15,56	32,68	3,13	10,39	15,44
17 Bukittinggi	13,66	21,07	6,18	5,89	11,70
18 Payakumbuh	24,30	48,95	1,64	2,49	19,35
19 Pariaman	24,12	25,62	23,19	11,48	21,10
Jumlah Kota	25,26	20,15	16,74	9,57	17,93
Jumlah Kab/Kota	20,49	32,17	8,30	10,02	17,75

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah selama periode 4 tahun (2013-2016) selalu menunjukkan peningkatan. Hanya saja peningkatannya menunjukkan perlambatan. Pada tahun 2013, pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 20,49 persen dibanding tahun 2012. Penerimaan pajak daerah terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 32,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2013. Pada tahun 2015 tetap mengalami peningkatan sebesar 8,30 persen, tetapi pertumbuhannya lebih lambat dibanding tahun 2014. Hingga tahun 2016 meningkat lagi menjadi 10,02 persen.

Sehingga rata-rata pertumbuhan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode tersebut sekitar 17,75 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak bagi daerah kota (17,93 persen)

lebih besar dibandingkan daerah kabupaten (17,56 persen). Sementara jika dibandingkan antar daerah di kabupaten/kota, pertumbuhannya sangat bervariasi berkisar antara 11,53 sampai 48,09 persen. Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung sebagai daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi dibanding daerah lain, yakni 48,09 persen. Diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat (26,94 persen) dan Pesisir Selatan (22,47 persen). Sedangkan Limapuluh Kota mempunyai pertumbuhan terendah dibanding daerah lain yakni 11,53 persen), diikuti oleh Bukittinggi (11,70 persen) dan Tanah Datar (12,75 persen).

Kontribusi Pajak Daerah

Diperoleh hasil perhitungan nilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti pada tabel berikut.

Tabel 9
Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2013-2016

Kabupaten/Kota	Persen					Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Kabupaten:						
1 Kep. Mentawai	0,00	2,39	3,34	4,47	6,03	3,25
2 Pesisir Selatan	17,46	26,07	17,98	13,35	12,59	17,49
3 Solok	23,36	22,01	20,03	19,51	19,46	20,87
4 Sijunjung	15,90	14,97	14,45	13,50	14,04	14,57
5 Tanah Datar	13,58	12,81	9,49	9,70	9,89	11,09
6 Pdg Pariaman	42,40	32,19	37,22	31,56	36,95	36,07
7 Agam	29,43	29,61	21,66	21,20	20,86	24,55

8	Limapuluh Kota	38,83	25,11	22,08	19,23	20,66	25,18
9	Pasaman	14,64	11,27	8,45	9,44	9,65	10,69
10	Solok Selatan	10,61	15,02	12,71	10,71	9,71	11,75
11	Dharmasraya	16,20	20,81	19,73	18,77	20,45	19,19
12	Pasaman Barat	23,71	24,37	28,44	19,33	15,02	22,17
Rata-rata Kabupaten		20,51	19,72	17,96	15,90	16,28	18,07
Kota:							
13	Padang	67,88	69,27	61,65	62,87	65,51	65,43
14	Solok	16,77	15,65	18,23	17,74	16,12	16,90
15	Sawahlunto	8,51	8,59	8,63	7,85	8,82	8,48
16	Padang Panjang	10,84	9,78	10,44	8,29	8,72	9,61
17	Bukittinggi	44,03	40,87	44,33	43,92	43,07	43,25
18	Payakumbuh	11,28	13,13	16,07	10,70	12,62	12,76
19	Pariaman	17,66	18,67	18,14	19,94	22,39	19,36
Rata-rata Kota		25,28	25,13	25,36	24,47	25,32	25,11
Rata-rata Kab/Kota		22,90	22,43	21,66	20,19	20,80	21,59

Sumber: Data diolah

Kontribusi pajak daerah merupakan nilai sumbangan penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD selama periode 2012-2016 berkisar antara 3,25 persen sampai 65,43 persen. Sehingga secara rata-rata tercatat sebesar 21,59 persen. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 (22,90 persen) sedangkan terendah terjadi pada tahun 2015 (20,19 persen). Jika dibandingkan rata-rata antar kabupaten dengan kota, ternyata kontribusi pajak kota (25,11 persen) lebih besar dibanding kontribusi pajak kabupaten (18,07 persen). Dan jika dibandingkan antar kabupaten/kota kontribusi pajak terhadap PAD sangat bervariasi, berkisar antara 3,25 persen sampai 65,43 persen. Padang sebagai ibukota Provinsi memiliki kontribusi terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya, yakni sebesar

65,43 persen. Diikuti oleh Bukittinggi (43,25 persen), dan Padang Pariaman (36,07 persen). Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung sebagai daerah yang mempunyai kontribusi penerimaan pajak daerah terendah dibanding daerah lain, yakni sebesar 3,25 persen, diikuti oleh Sawahlunto (8,48 persen) dan Padang Panjang (9,61 persen).

Retribusi Daerah Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah

Target penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selalu diharapkan meningkat setiap tahun. Hanya saja realisasi pencapaiannya yang bervariasi, kadang tidak mencapai target, kadang malah melebihi target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kabupaten :				
1	Kep. Mentawai	20 202 069 448.00	9 339 685 675.00	46,23
2	Pesisir Selatan	91 017 835 789.00	81 912 873 232.82	90,00

Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
3 Solok	59 796 025 393.00	55 031 143 758.00	92,03
4 Sijunjung	62 276 944 243.00	66 765 258 432.84	107,21
5 Tanah Datar	39 876 752 024.00	40 125 652 856.43	100,62
6 Padang Pariaman	54 899 197 100.00	51 012 734 788.00	92,92
7 Agam	86 728 391 916.00	83 836 996 035.58	96,67
8 Limapuluh Kota	39 466 609 377.00	31 736 182 326.03	80,41
9 Pasaman	85 584 243 650.00	99 889 792 063.00	116,72
10 Solok Selatan	42 123 418 593.00	33 981 962 876.85	80,67
11 Dharmasraya	65 923 418 626.00	59 675 190 474.93	90,52
12 Pasaman Barat	71 897 430 988.00	71 875 861 983.00	99,97
Jumlah Kabupaten	719 792 337 147.00	685 183 334 502.48	95,19
Kota :			
13 Padang	266 407 873 219.00	211 502 245 264.00	79,39
14 Solok	33 596 550 566.00	27 291 826 136.00	81,23
15 Sawahlunto	14 120 311 030.00	13 465 920 041.00	95,37
16 Padang Panjang	37 121 535 000.00	38 850 248 322.87	104,66
17 Bukittinggi	102 181 372 635.89	87 487 656 342.00	85,62
18 Payakumbuh	36 659 252 282.00	34 738 513 704.75	94,76
19 Pariaman	16 659 888 389.60	12 891 084 423.87	77,38
Jumlah Kota	506 746 783 122.49	426 227 494 234.49	84,11
Jumlah Kab/Kota	1 226 539 120 269.49	1 111 410 828 736.97	90,61

Sumber: Data diolah

Secara total, target penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2012-2016, sebesar Rp. 1.226,54 milyar. Sementara realisasinya mencapai Rp. 1.111,41 milyar. Berarti, secara keseluruhan penerimaan retribusi daerah pada periode tersebut tidak mencapai target yang sudah ditentukan, karena hanya sebesar 90,61 persen.

Jika kita membandingkan, penerimaan retribusi antara kabupaten dengan kota, ternyata pencapaian retribusi kabupaten lebih tinggi dibandingkan pencapaian retribusi kota. Target retribusi kabupaten sebesar 719,79 milyar rupiah dengan realisasi sebesar Rp. 685,18 milyar. Artinya realisasi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hanya tercapai sekitar 95,19 persen. Sedangkan target retribusi kota sebesar 506,75 milyar rupiah dengan realisasi sebesar Rp. 426,23

milyar. Artinya realisasi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hanya tercapai sekitar 84,11 persen, lebih rendah dari capaian daerah kabupaten.

Sebagai ibukota provinsi, kota Padang tercatat sebagai penerima retribusi terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, yakni sebesar Rp. 211,50 milyar. Diikuti oleh kota Pasaman Rp.99,89 milyar dan Bukittinggi Rp.87,49 milyar. Sementara Kepulauan Mentawai sebagai daerah pemekaran menerima perolehan retribusi paling rendah (Rp. 9,34 milyar), diikuti kota Pariaman (Rp.12,89 milyar) dan Sawahlunto (Rp. 13,46 milyar). Capaian retribusi paling tinggi adalah di Pasaman (116,72 persen) diikuti oleh Sijunjung (107,21 persen) dan Padang Panjang (106,66 persen). Sedangkan capaian penerimaan retribusi terendah terdapat di Kabupaten Mentawai (46,23 persen) diikuti oleh Kota Pariaman

(77,38 persen) dan Padang (79,39 persen).

Pertumbuhan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persentase pertumbuhan

penerimaan pajak daerah masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat selama tahun 2013-2016, serta rata-ratanya sebagai berikut:

Tabel 11
Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat, Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)				
	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Kabupaten:					
1 Kep. Mentawai	-	128,20	182,37	38,95	116,51
2 Pesisir Selatan	222,72	106,18	-85,95	-12,31	57,66
3 Solok	59,73	61,99	-26,87	18,00	28,21
4 Sijunjung	76,16	37,40	24,92	-71,34	16,79
5 Tanah Datar	38,48	68,85	-26,30	-6,33	18,67
6 Pdg Pariaman	269,69	0,13	-23,67	16,67	65,71
7 Agam	12,13	76,98	-57,75	-41,45	-2,52
8 Limapuluh Kota	217,32	-22,94	-34,80	-22,33	34,31
9 Pasaman	68,08	66,96	6,28	-83,72	14,40
10 Solok Selatan	74,59	23,62	-86,47	329,64	85,35
11 Dharmasraya	6,92	97,48	-70,40	-34,13	-0,03
12 Pasaman Barat	40,60	58,75	-9,59	-29,10	15,16
Jumlah Kabupaten	72,28	57,63	- 38,72	- 35,32	13,97
Kota:					
13 Padang	29,95	41,43	-9,37	-29,69	8,08
14 Solok	11,91	-0,20	7,48	9,31	7,13
15 Sawahlunto	32,61	-5,21	-11,97	6,31	5,44
16 Padang Panjang	- 72,26	-14,07	-2,46	13,52	-18,82
17 Bukittinggi	12,51	8,74	-5,61	23,72	9,84
18 Payakumbuh	10,81	-16,71	-21,97	14,15	-3,43
19 Pariaman	150,08	-22,53	10,95	25,00	40,88
Jumlah Kota	1,24	18,14	- 7,89	- 9,28	7,02
Jumlah Kab/Kota	36,76	37,88	- 23,31	- 22,30	10,49

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa realisasi pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah selama periode 4 tahun (2013-2016) sangat berfluktuasi. Kadang terjadi peningkatan, kadang malah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan retribusi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat

selama periode tersebut sekitar 10,49 persen. Pertumbuhan penerimaan retribusi bagi daerah kabupaten (13,97 persen) lebih besar dibandingkan daerah kota (7,02 persen). Sementara jika dibandingkan pertumbuhan penerimaan retribusi antar kabupaten/kota pertumbuhannya sangat bervariasi, berkisar antara -18,82 persen sampai

116,51 persen. Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung sebagai daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tertinggi dibanding daerah lain, yakni sebesar 116,51 persen. Diikuti oleh Kabupaten Solok Selatan (85,35 persen) dan Padang Pariaman (65,71 persen). Sedangkan Padang Panjang mempunyai pertumbuhan terendah dibanding daerah

lain yakni -18,82 persen, diikuti oleh Payakumbuh (-3,43 persen) dan Agam (-2,52 persen).

Kontribusi Retribusi Daerah

Adapun hasil perhitungan nilai kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Kontribusi Retribusi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	%					
	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Kabupaten:						
1 Kep. Mentawai	0.00	1.52	3.13	7.53	10.67	4.57
2 Pesisir Selatan	16.10	43.93	49.75	5.61	4.88	24.05
3 Solok	22.16	29.98	29.70	20.11	22.44	24.88
4 Sijunjung	22.18	34.03	32.83	34.23	8.30	26.31
5 Tanah Datar	9.27	10.80	11.68	7.65	6.75	9.23
6 Padang Pariaman	11.23	30.47	20.70	13.60	15.90	18.38
7 Agam	37.10	34.62	38.54	14.34	7.38	26.40
8 Limapuluh Kota	13.47	32.20	15.54	8.51	6.11	15.16
9 Pasaman	33.76	40.74	42.95	41.75	6.10	33.06
10 Solok Selatan	23.88	41.38	35.15	3.73	12.93	23.42
11 Dharmasraya	29.18	37.17	45.73	12.61	8.34	26.61
12 Pasaman Barat	27.35	33.93	28.37	25.95	13.95	25.91
Rata-rata Kabupaten	20.47	30.90	29.51	16.30	10.31	21.50
Kota:						
13 Padang	16.01	16.50	17.66	13.64	9.06	14.57
14 Solok	20.36	22.01	17.96	16.00	14.79	18.22
15 Sawahlunto	6.58	8.20	5.94	4.86	5.06	6.13
16 Padang Panjang	59.56	12.90	8.92	6.70	7.24	19.06
17 Bukittinggi	32.72	30.06	29.28	25.79	29.55	29.48
18 Payakumbuh	14.98	15.54	10.64	5.44	7.14	10.75
19 Pariaman	7.14	15.20	9.11	9.02	11.36	10.37
Rata-rata Kota	22.48	17.20	14.22	11.63	12.03	15.51
Rata-rata Kab/Kota	21.48	24.05	21.86	13.97	11.17	18.50

Sumber: Data ditolah

Kontribusi retribusi daerah merupakan nilai sumbangan penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selama periode 2012 sampai 2016, secara rata-rata tercatat sebesar

18,50 persen. Jika dibandingkan rata-rata antar kabupaten dengan kota, ternyata kontribusi retribusi kabupaten (21,50 persen) lebih besar dibanding kontribusi retribusi kota (15,51 persen). Jika

dibandingkan antar kabupaten/kota kontribusi retribusi terhadap PAD sangat bervariasi, berkisar antara 4,57 sampai 33,06 persen. Pasaman memiliki kontribusi retribusi terbesar terhadap PAD nya yakni sebesar 33,06 persen, diikuti oleh Bukittinggi (29,48 persen), dan Agam (26,40 persen). Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung sebagai daerah yang mempunyai kontribusi penerimaan retribusi daerah terendah

dibanding daerah lain, yakni sebesar 4,57 persen, diikuti oleh Sawahlunto (6,13 persen) dan Tanah Datar (9,23 persen).

Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Proyeksi Pajak Daerah

Berdasarkan rumus rata-rata pertumbuhan tersebut maka diperoleh rata-rata pertumbuhan untuk pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 13
Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah 2012-2016

Kabupaten/Kota	Nilai (Juta Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	
Kabupaten:						
1 Kep. Mentawai	0.00	785.64	1 218.83	1 914.10	2 528.06	0.48
2 Pesisir Selatan	7 026.80	12 418.26	15 591.93	14 420.46	13 712.84	0.18
3 Solok	6 233.47	6 929.89	10 313.71	10 848.12	11 441.16	0.16
4 Sijunjung	5 275.70	5 701.95	7 839.20	8 778.64	10 787.39	0.20
5 Tanah Datar	7 293.77	8 174.67	9 458.24	10 872.91	11 771.07	0.13
6 Pdg Pariaman	13 267.03	13 718.10	23 381.38	23 040.82	26 922.24	0.19
7 Agam	12 235.81	14 793.61	17 200.43	19 121.91	21 399.03	0.15
8 Limapuluh Kota	9 682.94	8 309.77	11 663.13	12 104.53	14 060.80	0.10
9 Pasaman	4 837.78	5 187.90	6 156.71	7 525.78	8 579.48	0.15
10 Solok Selatan	2 339.17	3 338.46	4 112.08	4 415.20	4 962.47	0.21
11 Dharmasraya	6 351.54	6 846.73	10 419.53	10 643.03	11 542.78	0.16
12 Pasaman Barat	7 704.53	8 973.93	19 889.83	13 362.58	13 693.34	0.15
Kota:						
13 Padang	128 595.10	165 460.99	194 620.52	232 870.24	256 746.61	0.19
14 Solok	3 911.74	3 777.93	5 383.37	6 319.83	6 787.36	0.15
15 Sawahlunto	2 969.92	3 185.51	4 190.40	4 101.04	4 707.46	0.12
16 Padang Panjang	3 514.18	4 060.96	5 388.06	5 556.83	6 134.35	0.15
17 Bukittinggi	19 848.46	22 560.67	27 314.14	29 002.14	30 709.69	0.12
18 Payakumbuh	5 720.65	7 110.93	10 591.50	10 765.42	11 033.69	0.18
19 Pariaman	3 103.93	3 852.67	4 839.64	5 961.98	6 646.52	0.21

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun 2012 sampai 2016 seperti tabel 13, maka dihitung proyeksi penerimaan pajak

daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 sampai 2020 (tabel 13).

Tabel 14
Proyeksi Pajak Daerah 2017-2020

Kabupaten/Kota	Nilai (Juta Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
Kabupaten:				
1 Kep. Mentawai	3 732.29	5 510.14	8 134.88	12 009.89
2 Pesisir Selatan	16 207.65	19 156.34	22 641.48	26 760.69
3 S o l o k	13 316.95	15 500.30	18 041.60	20 999.55
4 Sijunjung	12 899.57	15 425.32	18 445.62	22 057.30
5 Tanah Datar	13 267.28	14 953.68	16 854.43	18 996.78
6 Padang Pariaman	32 132.58	38 351.28	45 773.51	54 632.18
7 A g a m	24 608.46	28 299.24	32 543.57	37 424.46
8 Limapuluh Kota	15 435.14	16 943.82	18 599.96	20 417.98
9 Pasaman	9 900.67	11 425.31	13 184.74	15 215.11
10 Solok Selatan	5 989.03	7 227.96	8 723.18	10 527.71
11 Dharmasraya	13 401.96	15 560.59	18 066.91	20 976.92
12 Pasaman Barat	15 810.67	18 255.38	21 078.12	24 337.31
Kota:				
13 Padang	305 193.16	362 781.28	431 235.94	512 607.57
14 S o l o k	7 789.94	8 940.60	10 261.23	11 776.93
15 Sawahlunto	5 281.98	5 926.62	6 649.94	7 461.53
16 Padang Panjang	7 051.06	8 104.77	9 315.94	10 708.11
17 Bukittinggi	34 250.16	38 198.80	42 602.68	47 514.27
18 Payakumbuh	13 002.89	15 323.53	18 058.34	21 281.23
19 Pariaman	8 040.17	9 726.03	11 765.40	14 232.37

Sumber: data diolah

Dari hasil proyeksi, Padang sebagai ibukota Provinsi tetap akan mempunyai penerimaan pajak tertinggi dibanding daerah lain. Untuk tahun 2020, diperkirakan pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah kota Padang mencapai Rp. 512,607 milyar. Sedangkan Sawahlunto diperkirakan

dapat memungut pajak pada tahun yang sama hanya sebesar Rp.7,461 milyar.

Proyeksi Retribusi Daerah

Berdasarkan rumus rata-rata pertumbuhan, maka diperoleh rata-rata pertumbuhan untuk retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 15
Rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Nilai (Juta Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	
Kabupaten:						
1 Kep. Mentawai	0.00	500.00	1 141.02	3 221.89	4 476.77	1.08
2 Pesisir Selatan	6 482.53	20 920.19	43 132.51	6 061.83	5 315.80	-0.05
3 S o l o k	5 911.34	9 442.01	15 294.82	11 184.81	13 198.16	0.22
4 Sijunjung	7 359.19	12 964.05	17 812.29	22 251.96	6 377.76	-0.04

Kabupaten/Kota	Nilai (Juta Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	
5 Tanah Datar	4 978.11	6 893.53	11 639.78	8 578.76	8 035.47	0.13
6 Padang Pariaman	3 513.00	12 987.12	13 004.44	9 926.53	11 581.66	0.35
7 A g a m	15 424.15	17 295.72	30 609.65	12 934.06	7 573.42	-0.16
8 Limapuluh Kota	3 357.99	10 655.71	8 211.14	5 353.34	4 158.01	0.05
9 Pasaman	11 154.52	18 748.55	31 301.87	33 267.88	5 416.97	-0.17
10 Solok Selatan	5 267.64	9 196.73	11 369.25	1 538.46	6 609.88	0.06
11 Dharmasraya	11 438.25	12 229.40	24 150.24	7 148.67	4 708.62	-0.20
12 Pasaman Barat	8 888.04	12 496.76	19 838.67	17 936.12	12 716.27	0.09
Kota:						
13 Padang	30 325.98	39 409.96	55 736.71	50 512.58	35 517.01	0.04
14 S o l o k	4 747.47	5 312.91	5 302.50	5 699.28	6 229.66	0.07
15 Sawahlunto	2 295.58	3 044.14	2 885.46	2 540.18	2 700.56	0.04
16 Padang Panjang	19 308.19	5 355.48	4 602.13	4 488.80	5 095.65	-0.28
17 Bukittinggi	14 748.99	16 593.46	18 043.44	17 031.26	21 070.50	0.09
18 Payakumbuh	7 596.01	8 417.03	7 010.41	5 470.55	6 244.52	-0.05
19 Pariaman	1 254.63	3 137.63	2 430.79	2 696.87	3 371.15	0.28

Sumber: Data diolah

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun 2012 sampai 2016 seperti tabel 15, maka dihitung proyeksi penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk tahun 2017 sampai 2020 (tabel 15). Dari hasil proyeksi, Kepulauan Mentawai diperkirakan, akan dapat memungut retribusi lebih besar

dibanding daerah lain. Untuk tahun 2020, diperkirakan retribusi yang bisa dipungut oleh pemerintah Kabupaten Mentawai mencapai Rp. 83,23 milyar. Sedangkan Padang Panjang diperkirakan hanya dapat memungut pajak pada tahun yang sama hanya sebesar Rp.1,34 milyar.

Tabel 16
Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	Nilai (Juta Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
Kabupaten:				
1 Kep. Mentawai	9 296.02	19 303.17	40 083.02	83 232.36
2 Pesisir Selatan	5 058.53	4 813.72	4 580.75	4 359.06
3 S o l o k	16 133.19	19 720.92	24 106.49	29 467.33
4 Sijunjung	6 153.58	5 937.28	5 728.58	5 527.21
5 Tanah Datar	9 057.29	10 209.04	11 507.25	12 970.55
6 Padang Pariaman	15 606.08	21 028.93	28 336.12	38 182.44
7 A g a m	6 339.64	5 306.86	4 442.32	3 718.63
8 Limapuluh Kota	4 386.19	4 626.89	4 880.80	5 148.64
9 Pasaman	4 522.02	3 774.93	3 151.27	2 630.64
10 Solok Selatan	6 995.81	7 404.28	7 836.59	8 294.14
11 Dharmasraya	3 771.62	3 021.07	2 419.88	1 938.33
12 Pasaman Barat	13 907.47	15 210.25	16 635.08	18 193.38
Kota:				
13 Padang	36 948.08	38 436.80	39 985.51	41 596.62

Kabupaten/Kota	Nilai (Juta Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
14 Solok	6 667.53	7 136.18	7 637.77	8 174.61
15 Sawahlunto	2 812.51	2 929.10	3 050.52	3 176.98
16 Padang Panjang	3 652.28	2 617.75	1 876.26	1 344.80
17 Bukittinggi	23 035.79	25 184.37	27 533.36	30 101.45
18 Payakumbuh	5 946.03	5 661.81	5 391.18	5 133.49
19 Pariaman	4 316.13	5 525.99	7 074.99	9 058.19

Sumber: Data diolah

Pembahasan

Untuk melihat apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah efektif atau tidak efektif, dapat ditinjau dari capaian realisasi terhadap targetnya. Sedangkan untuk melihat keberhasilan realisasi penerimaan baik pajak maupun retribusi ditinjau dari

pertumbuhannya. Dan untuk melihat apakah realisasinya baik atau tidak, ditinjau dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kriteria untuk menentukan apakah pajak daerah dapat dikatakan efektif, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17
Kriteria Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten	Efektifitas	Kriteria	Kota	Efektifitas	Kriteria
Kep. Mentawai	65.24	Kurang efektif	Padang	98.75	Efektif
Pesisir Selatan	114.50	Sangat Efektif	S o l o k	107.88	Sangat Efektif
S o l o k	103.73	Sangat Efektif	Sawahlunto	99.82	Efektif
Sijunjung	112.49	Sangat Efektif	Padang Panjang	102.62	Sangat Efektif
Tanah Datar	93.79	Efektif	Bukittinggi	94.55	Efektif
Padang Pariaman	96.19	Efektif	Payakumbuh	104.44	Sangat Efektif
A g a m	109.15	Sangat Efektif	Pariaman	109.77	Sangat Efektif
Limapuluh Kota	105.73	Sangat Efektif			
Pasaman	109.23	Sangat Efektif			
Solok Selatan	67.22	Kurang efektif			
Dharmasraya	66.98	Kurang efektif			
Pasaman Barat	94.02	Efektif			
Jumlah Kabupaten	96.83	Efektif	Jumlah Kota	98.95	Efektif
	Jumlah Kabupaten/Kota			98.25	Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, secara rata-rata selama periode 2012-2016 realisasi penerimaan pajak daerah adalah efektif. Hal ini terlihat bahwa sekitar 98,25 persen dari target yang ditetapkan sudah terealisasi. Dan keadaan ini juga berlaku pada daerah kabupaten (96,83 persen) maupun kota (98,95 persen). Jika diperhatikan per daerahnya, sebagian besar daerah sudah sangat efektif realisasi penerimaan pajak daerahnya karena sudah melebihi target yang ditetapkan (yakni lebih dari 100 persen). Daerah tersebut adalah Pesisir Selatan,

Kab Solok, Sijunjung, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Kota Solok, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Pariaman. Sementara Tanah Datar, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Padang, Sawahlunto, dan Bukittinggi tergolong efektif realisasi penerimaan pajak daerahnya karena berada pada rentang 90 sampai 100 persen. Hanya Kepulauan Mentawai yang masih kurang efektif dalam penerimaan pajak daerah karena hanya mencapai 65,24 persen. Sedangkan kriteria untuk menentukan

apakah retribusi daerah dapat dikatakan efektif, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Kriteria Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten	Pertumbuhan	Kriteria	Kota	Pertumbuhan	Kriteria
Kep. Mentawai	46.23	Tidak efektif	Padang	79.39	Kurang efektif
Pesisir Selatan	90.00	Efektif	S o l o k	81.23	Cukup efektif
S o l o k	92.03	Efektif	Sawahlunto	95.37	Efektif
Sijunjung	107.21	Sangat Efektif	Padang Panjang	104.66	Sangat Efektif
Tanah Datar	100.62	Sangat Efektif	Bukittinggi	85.62	Cukup efektif
Padang Pariaman	92.92	Efektif	Payakumbuh	94.76	Efektif
A g a m	96.67	Efektif	Pariaman	77.38	Kurang efektif
Limapuluh Kota	80.41	Cukup efektif			
Pasaman	116.72	Sangat Efektif			
Solok Selatan	80.67	Cukup efektif			
Dharmasraya	90.52	Efektif			
Pasaman Barat	99.97	Efektif			
Jumlah Kabupaten	95.19	Efektif	Jumlah Kota	84.11	Cukup efektif
Jumlah Kabupaten/Kota				90.61	Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, secara rata-rata selama periode 2012-2016 realisasi penerimaan retribusi daerah adalah efektif. Hal ini terlihat bahwa sekitar 90,61 persen dari target yang ditetapkan sudah terealisasi. Dan keadaan ini juga berlaku pada daerah kabupaten (95,19 persen), tetapi pada daerah kota cukup efektif, karena hanya mencapai 84,11 persen. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota, hasil pengelompokan berdasarkan kriteria capaian realisasi terhadap targetnya sangat beragam. Hanya empat daerah yang realisasi penerimaan retribusi daerahnya melebihi dari target yang sudah ditetapkan (lebih dari 100 persen). Daerah tersebut adalah Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, dan Padang Panjang. Sedangkan daerah yang tergolong efektif

realisasi penerimaan retribusi daerahnya karena mencapai antara 90 sampai 100 persen, adalah Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Dharmasraya, Pasaman Barat, Sawahlunto dan Payakumbuh. Sementara Limapuluh Kota, Solok Selatan, Kota Solok dan Bukittinggi tergolong cukup efektif karena capaian realisasinya berada pada rentang 80 sampai 90 persen. Kota Padang dan Pariaman hanya mencapai 79,39 persen dan 77,38 persen sehingga tergolong pada yang kurang efektif. Sementara Kepulauan Mentawai sangat tidak efektif karena capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan sangat rendah sekali hanya 46,23 persen.

Untuk menentukan kriteria apakah pajak daerah dapat dikatakan berhasil, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19
Kriteria Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten	Kriteria	Keterangan	Kota	Kriteria	Keterangan
Kep. Mentawai	48,09	Kurang berhasil	Padang	19,05	Tidak berhasil
Pesisir Selatan	22,47	Tidak berhasil	S o l o k	15,97	Tidak berhasil
S o l o k	17,66	Tidak berhasil	Sawahlunto	12,86	Tidak berhasil
Sijunjung	20,11	Tidak berhasil	Padang Panjang	15,44	Tidak berhasil
Tanah Datar	12,75	Tidak berhasil	Bukittinggi	11,70	Tidak berhasil
Padang Pariaman	22,31	Tidak berhasil	Payakumbuh	19,35	Tidak berhasil
A g a m	15,06	Tidak berhasil	Pariaman	21,10	Tidak berhasil
Limapuluh Kota	11,53	Tidak berhasil			

Kabupaten	Kriteria	Keterangan	Kota	Kriteria	Keterangan
Pasaman	15,54	Tidak berhasil			
Solok Selatan	21,41	Tidak berhasil			
Dharmasraya	17,64	Tidak berhasil			
Pasaman Barat	26,94	Tidak berhasil			
Jumlah Kabupaten	17,56	Tidak berhasil	Jumlah Kota	17,93	Tidak berhasil
Jumlah Kab/Kota				17,75	Tidak berhasil

Sumber: Data diolah

Secara rata-rata dilihat dari pertumbuhannya selama periode 2013 sampai 2016 kriteria yang dicapai tidak berhasil. Karena hanya mencapai 17,75 persen (kurang dari 30 persen). Demikian juga dengan kabupaten maupun kotanya. Jika dibandingkan

antar daerah, hanya Kepulauan Mentawai yang masuk kriteria kurang berhasil karena mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 48,09 persen. Untuk menentukan kriteria apakah retribusi daerah dapat dikatakan berhasil, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20
Kriteria Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Kep. Mentawai	116,51	Sangat berhasil	Padang	8,08	Tidak berhasil
Pesisir Selatan	57,66	Cukup berhasil	S o l o k	7,13	Tidak berhasil
S o l o k	28,21	Tidak berhasil	Sawahlunto	5,44	Tidak berhasil
Sijunjung	16,79	Tidak berhasil	Padang Panjang	-18,82	Tidak berhasil
Tanah Datar	18,67	Tidak berhasil	Bukittinggi	9,84	Tidak berhasil
Padang Pariaman	65,71	Cukup berhasil	Payakumbuh	-3,43	Tidak berhasil
A g a m	-2,52	Tidak berhasil	Pariaman	40,88	Kurang berhasil
Limapuluh Kota	34,31	Kurang berhasil			
Pasaman	14,40	Tidak berhasil			
Solok Selatan	85,35	Sangat berhasil			
Dharmasraya	-0,03	Tidak berhasil			
Pasaman Barat	15,16	Tidak berhasil			
Rata-rata Kabupaten	13,97	Tidak berhasil	Rata-rata Kota	7,02	Tidak berhasil
Rata-rata Kab/Kota				10,49	Tidak berhasil

Sumber: Data diolah

Secara rata-rata selama periode 2013 sampai 2016, jika dilihat dari pertumbuhan retribusinya, masuk kategori tidak berhasil. Karena hanya mencapai 10,49 persen (kurang dari 30 persen). Demikian juga dengan kabupaten maupun kotanya. Jika dibandingkan antar daerah, hanya Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan

yang masuk kriteria sangat berhasil karena mencapai pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar 116,51 persen dan 85,35 persen. Pertumbuhan kedua daerah daerah tersebut berada pada rentang di atas 85 persen.

Untuk menentukan kriteria apakah pajak daerah dapat dikatakan baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
-----------	---	------------	------	---	------------

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Kep. Mentawai	3,25	Sangat kurang baik	Padang	65,43	Sangat baik
Pesisir Selatan	17,49	Kurang baik	S o l o k	16,90	Kurang baik
S o l o k	20,87	Cukup baik	Sawahlunto	8,48	Sangat kurang baik
Sijunjung	14,57	Kurang baik	Padang Panjang	9,61	Sangat kurang baik
Tanah Datar	11,09	Kurang baik	Bukittinggi	43,25	Baik
Padang Pariaman	36,07	Sedang	Payakumbuh	12,76	Kurang baik
A g a m	24,55	Cukup baik	Pariaman	19,36	Kurang baik
Limapuluh Kota	25,18	Cukup baik			
Pasaman	10,69	Kurang baik			
Solok Selatan	11,75	Kurang baik			
Dharmasraya	19,19	Kurang baik			
Pasaman Barat	22,17	Cukup baik			
Rata-rata Kabupaten	18,07	Kurang baik	Rata-rata Kota	25,11	Cukup baik
Rata-rata Kab/Kota				21,59	Cukup baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata selama periode 2012 sampai 2016 tergolong cukup baik karena hanya mencapai 21,59 persen (berada pada rentang 20-30 persen). Sementara secara rata-rata kabupaten tergolong kurang baik (18,07 persen), tapi rata-rata kota tergolong cukup baik karena mencapai 25,11 persen. Jika dibandingkan kontribusi pajak antar daerah kabupaten/kota, sangat beragam. Hanya kota Padang yang tergolong sangat baik, karena lebih dari 50 persen (65,43 persen). Sementara Bukittinggi tergolong baik karena kontribusi pajaknya mencapai 43,25 persen terhadap PAD nya. Kabupaten Solok (20,87 persen), Agam (24,55 persen),

Limapuluh Kota (25,15 persen), dan Pasaman Barat (22,17 persen) berada pada kriteria cukup baik. Sebagian besar berada pada kriteria yang kurang baik karena kontribusi pajak terhadap PAD berada pada persentase 10-20 persen. Daerah tersebut adalah Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Kota Solok, Payakumbuh, dan Pariaman. Bahkan ada kabupaten yang berada pada kriteria sangat kurang baik karena kontribusinya kurang dari 10 persen. Daerah yang tergolong sangat kurang baik tersebut adalah Kep. Mentawai, Sawahluto, dan Padang Panjang.

Untuk menentukan kriteria apakah retribusi daerah dapat dikatakan baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Kep. Mentawai	4,57	Sangat kurang baik	Padang	4,57	Kurang baik
Pesisir Selatan	24,05	Cukup baik	S o l o k	8,22	Kurang baik
S o l o k	24,88	Cukup baik	Sawahlunto	6,13	Sangat kurang baik
Sijunjung	26,31	Cukup baik	Padang Panjang	19,06	Kurang baik
Tanah Datar	9,23	Sangat kurang baik	Bukittinggi	29,48	Cukup baik
Padang Pariaman	18,38	Kurang baik	Payakumbuh	10,75	Kurang baik

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Agam	26,40	Cukup baik	Pariaman	10,37	Kurang baik
Limapuluh Kota	15,16	Kurang baik			
Pasaman	33,06	Sedang			
Solok Selatan	23,42	Cukup baik			
Dharmasraya	26,61	Cukup baik			
Pasaman Barat	25,91	Cukup baik			
Rata-rata Kabupaten	1,50	Cukup baik	Rata-rata Kota	5,51	Kurang baik
Rata-rata Kab/Kota				8,50	Kurang baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata kontribusi retribusi kabupaten/kota se Sumatera Barat selama periode 2012-2016, berada pada kriteria kurang baik karena hanya sebesar 18,50 persen. Demikian juga untuk daerah bagian kota (15,51 persen), sedangkan daerah kabupaten tergolong cukup baik (21,50 persen).

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, hanya Kabupaten Pasaman yang berada pada kriteria sedang (33,06 persen). Delapan daerah tergolong cukup baik karena nilai kontribusi retribusinya terhadap PAD berkisar antara 20-30 persen. Daerah yang kriteria cukup baik tersebut adalah Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Agam, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Bukittinggi. Sedangkan 7 daerah yang berada pada kriteria kurang baik, yakni Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Padang, Kota Solok, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Pariaman. Dan 3 daerah lainnya tergolong sangat kurang karena hanya mempunyai kontribusi retribusi terhadap PADnya kurang dari 10 persen. Daerah tersebut adalah Kep. Mentawai, Tanah Datar, dan Sawahlunto.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Target penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selalu optimis, meningkat setiap tahun selama periode 2013-2016. Hanya saja secara keseluruhan penerimaan pajak daerah pada periode tersebut belum mencapai target yang sudah ditentukan. Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak dinilai sudah efektif karena sudah mencapai 98,25 persen. Dan jika dilihat dari pertumbuhan cenderung mengalami peningkatan. Tetapi karena hanya mencapai 17,75 persen sehingga berada pada kriteria yang tidak berhasil. Sementara kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong cukup baik karena mencapai 21,59 persen.
2. Persentase realisasi pertumbuhan retribusi daerah terhadap target yang sudah ditetapkan sangat berfluktuasi. Secara rata-rata pada periode yang sama mencapai 90,61 persen. Sehingga termasuk pada kriteria yang efektif. Tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya berada pada kriteria tidak berhasil karena hanya mencapai 10,49 persen. Kontribusi retribusi terhadap PAD tergolong kriteria kurang baik karena hanya mencapai 18,50 persen.
3. Diperkirakan pada tahun 2020, penerimaan pajak daerah tertinggi adalah kota Padang sebesar Rp. 512,607 milyar, dan penerimaan retribusi tertinggi adalah Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 83,23 milyar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus lebih digalakkan agar terciptanya kesadaran kolektif sehingga masyarakat menjalankan kewajibannya demi meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Lebih ditingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik lagi sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih optimal.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat khususnya dinas yang terkait harus mengikuti prosedur yang ada dan lebih tegas lagi terhadap wajib pajak melalui pemberian sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT.Gramedia
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kusuma,dkk. 2013. “*Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*”. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Nugroho, Adi. 2009. “*Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*”. Universitas Dian Nuswantoro.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeparman Soemahamidjaja. 2002. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Aflabeta.
- Susnawati, dkk. 2014. “*Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Do Kota Metro*”. JEP-Vol.3. Universitas Lampung.
- Syafitri. 2016. “*Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*”
- S.I Djajadiningrat Dalam buku Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan*

*Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No.34 Tahun 2000,
tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI No.18 tahun 1997
tentang pajak daerah dan
Retribusi daerah*